

Pengaruh Tata Kelola Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN

¹Ari Fahrur Rozi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
fahrurrozi050601@gmail.com

Abstrak: Sejauh ini, kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi lebih banyak berfokus pada faktor ekonomi saja, contohnya suku bunga, pajak dan investasi FDI (*Foreign Direct Investment*), dan inflasi. Sementara itu ada beberapa faktor selain ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dari sisi tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang masih sangat sedikit penelitiannya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan di negara ASEAN dengan menggunakan alat regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Efektivitas pemerintah, Kualitas regulasi, dan aturan hukum memiliki pengaruh signifikan. Adapun hasil lain yakni indikator Pengendalian korupsi dan stabilitas politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Efektivitas Pemerintah, Kualitas Regulasi, Aturan Hukum, Stabilitas Politik, Pengendalian Korupsi

Pendahuluan

Secara global pertumbuhan ekonomi selalu dijadikan sebagai salah satu bagian dari indikator yang paling diperhatikan untuk mengukur seberapa keberhasilan suatu pembangunan di sebuah negara. Sejauh ini, kajian tentang faktor – faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi lebih banyak berfokus pada faktor ekonomi saja, contohnya suku bunga, pajak dan investasi FDI (*Foreign Direct Investment*), dan inflasi (Marlina et al. 2019). Sementara itu ada beberapa faktor selain ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dari sisi tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang masih sangat sedikit penelitiannya. Ini menjadi hal yang lebih menarik untuk dijadikan topik pembahasan karena tata kelola pemerintah yang baik dapat menciptakan kondisi pasar yang baik pula.

United Nations Development Program (UNDP) dan *Asian Development Bank (ADB)* adalah penggagas pertama dari kerangka tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Berdasarkan *world bank*, mengatakan adanya hubungan erat antara *good governance*, *stable governance* serta sosial ekonomi ke arah yang lebih maju (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2011). *World Bank* menggunakan indeks untuk mengukur tata kelola pemerintahan. Nilai indeks berkisar antara -2,5 hingga 2,5. Nilai -2,5 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di suatu negara sangat buruk, sedangkan nilai 2,5 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di suatu negara sangat baik, adapun indikator penilaiannya sebagai efektivitas pemerintah,



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC-BY-SA license

kualitas regulasi, aturan hukum, stabilitas politik dan pengendalian korupsi (World Bank 2006).

. Mengutip hasil dari penelitian yang di lakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) (2015), mengemukakan pada periode 2006 – 2015 adalah waktu terbaik bagi negara yang berada di kawasan Asia tenggara karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Maka ASEAN ini dipilih untuk menjadi objek penelitian.

Dikarenakan mekanisme pasar saat ini, dalam pembangunan sebuah negara peran pemerintah menjadi sangat lah penting, dan menjadi dasar bagi sistem kapitalisme, tidak dapat berjalan secara optimal akibat sering terjadinya krisis ekonomi. Aliran Keynesian sudah memperkirakan permintaan dan penawaran tidak mampu di selesaikan oleh pasar. Keynes berpendapat bahwa peran negara sangat lah dibutuhkan dalam kondisi yang seperti ini (Weng et al. 2013). Dengan demikian, semakin baik efektivitas pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin positif. Selain indikator efektivitas pemerintah kualitas regulasi juga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2016) menghasilkan bahwa kemampuan regulasi sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat serta menerapkan aturan dan kebijakan untuk tujuan yang mengembangkan sektor swasta. Namun, dalam penelitian yang di tulis oleh Hyunh dan Jachi-Chavez (2009) menunjukkan kualitas regulasi tidak ada pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi.

Hal yang sangat penting faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tata kelola pemerintahan adalah aturan hukum, termasuk di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian Resnick dan Birner (2006), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh aturan hukum secara positif. Penelitian Haggard dan Tiede (2010) juga menemukan bahwa aturan hukum memiliki hubungan sebab akibat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal yang sangat penting faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tata kelola pemerintahan adalah pengendalian korupsi. Menurut penelitian Hunyh dan Jacho-Chavez (2009), dan Aidt, Duta, dan Sena (2008) menjelaskan pengendalian korupsi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang mempunyai pengaruh yang positif dan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat di ASEAN ialah stabilitas politik. Menurut Ali (2008), negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki institusi yang kuat, yang ditunjukkan oleh peradilan yang efisien, kebebasan ekonomi, korupsi yang rendah, pemerintahan yang efektif, dan perlindungan terhadap properti. Berdasarkan penelitian ASEAN Matters For America (2013), tidak semua negara ASEAN memiliki perekonomian yang mapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa beberapa negara ASEAN dengan kondisi kualitas regulasi, efektivitas pemerintah, aturan hukum, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dikendalikan oleh pengendalian korupsi yang buruk. Berdasarkan



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC-BY-SA license

latar belakang tersebut penulis tertarik menyusun penelitian dengan judul “Pengaruh tata kelola pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara – Negara ASEAN”.

Literature Review

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Governance (2009), Menurut teori Keynes, kondisi perekonomian makro dapat memengaruhi perilaku individu dalam perekonomian mikro. Ekonomi klasik berpendapat bahwa kinerja perekonomian ditentukan oleh pengembangan *output* potensial, sedangkan Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat merupakan indikator utama yang menggerakkan perekonomian, terutama ketika terjadi penurunan laju perekonomian. Apabila pemerintah meningkatkan pengeluarannya, maka uang yang beredar di masyarakat akan meningkat, sehingga konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Disisi lain, tabungan juga akan meningkat, yang bisa dipakai untuk berinvestasi. Hal ini akan mendorong perbaikan kondisi perekonomian. Kartika Dewi dkk. (2015) mengemukakan bahwa tidak hanya faktor non – ekonomi yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi kebijakan pemerintah juga bisa mempengaruhi. Fuceri dan Karras (2017) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari berbagai indikator, seperti produk domestik bruto (PDB), tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi.

Tata Kelola Dalam Perspektif Islam

Bayar (2016) Tata kelola yang baik adalah cara mengelola suatu organisasi atau lembaga secara profesional, sehingga dapat mencapai tujuannya dengan baik. Nilai akuntabilitas dan demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat sejalan dengan tuntunan Islam. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 159 yang berbunyi, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal." Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk dalam hal kebijakan pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara–Negara ASEAN

Pendapat Bayar (2016) Efektivitas pemerintah merupakan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, yang dapat tercermin melalui layanan publik yang berkualitas, kebijakan yang terlaksana dengan baik, dan peraturan yang dijalankan dengan kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dikarenakan efektivitas pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

doi 10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC–BY-SA license

investasi dan bisnis, serta meningkatkan kepercayaan dan optimisme masyarakat. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian tersebut maka hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut:
H1: Variabel Efektivitas Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara – negara ASEAN

Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara – Negara ASEAN

Crystallography (2016) pengukuran kualitas regulasi dalam sebuah negara menggunakan beberapa indikator sebagai berikut: kemudahan untuk mendaftarkan barang hegemoni pemerintah dalam ekonomi kerangka kebijakan, aturan, kelembagaan dalam upaya menciptakan sektor keuangan pedesaan berbasis pasar efisien, adil dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, kemudahan untuk memulai bisnis baru dan menutup bisnis lama, serta Prevalensi peraturan dan persyaratan administratif yang memudahkan atau memberatkan usaha masyarakat. Yilmaz Bayar (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa suatu regulasi yang berkualitas adalah indikator dari tata kelola pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian tersebut dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2: Variabel Kualitas Regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara – negara ASEAN

Pengaruh Aturan Hukum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara–Negara ASEAN

Pertumbuhan ekonomi tak lepas dari supremasi hukum yang selalu dilibatkan, karena kepastian keamanan kepemilikan, pelaksanaan kontrak yang adil, hak milik, dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan penelitian Todaro dan Smith (2006) mengemukakan adanya Institusi yang baik, sama halnya dengan aturan hukum yang bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pendapatan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian tersebut dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3: Variabel Aturan Hukum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara – negara ASEAN

Pengaruh Stabilitas Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara–Negara ASEAN

Perubahan besar pada pemerintahan bisa memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi apabila pemerintahan baru dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan menguntungkan bagi investor (Younis et al. 2016). Bah dan Kpognon (2020) serta Ullan Awan et al. (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian tersebut dapat di temukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Variabel Stabilitas Politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara – negara ASEAN



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara–Negara ASEAN

World Bank mengemukakan adanya penipuan dan korupsi merupakan hambatan serius dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Chaudhry et al. 2009). Todaro dan Smith (2006), mengemukakan pendapat bahwa Kinerja lembaga negara yang baik, termasuk bebas dari korupsi, merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi. Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian tersebut dapat kita paparkan hipotesisnya sebagai berikut:
H5: Variabel Pengendalian Korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara – negara ASEAN.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pengolahan data menggunakan teknik data panel, di mana data *cross section* dan *time series* ini dikombinasikan. Negara di kawasan ASEAN menjadi data *cross section* dalam penelitian ini selama periode *time series* 2010 – 2022. Data tersebut diperoleh dari World Bank. Dengan kurun waktu kurang lebih 13 tahun dan 10 negara anggota ASEAN, yaitu, Filipina, Malaysia, Myanmar, , Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Laos, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan data panel karena metode ini memiliki beberapa kelebihan. Adapun model panel yang dimaksud dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = b_0 + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + \dots + b_kX_{kit} + u_i + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots$$

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis

Tabel 1 tentang analisis deskriptif menjelaskan bahwa setiap pengumpulan data yang akan diperiksa akan memiliki 130 observasi. Variabel terikatnya yaitu, Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiringan lereng adalah -17.91294 tahun 2021 dan 14.51975 pada tahun 2020. Pertumbuhan Ekonomi rata-rata (*mean*) dari 2010 hingga 2022 adalah 4.454815, dengan standar deviasi 3.989994, menurut data. Dalam variabel Efektivitas Pemerintah untuk perubahan, nilai minimum adalah 8.056872, dan nilai maksimum adalah 100. Nilai rata-rata (*mean*) untuk tahun 2010-2022 adalah 64.85747, dengan standar deviasi 24.60163. Selanjutnya, untuk mengukur Kualitas Regulasi, Pengendalian Korupsi, Stabilitas politik, dan Aturan hukum, ke 5 variabel ini mempunyai rata-rata yang berbeda yaitu dikategorikan dari: 64.85747, 60.16216, 50.53959, 56.00776, dan 53.34115, sedangkan standar deviasi adalah 24.60163, 24.5149, 25.31891, 28.47772, dan 25.00702.



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC–BY-SA license

Tabel 1 Analisis Deskriptif

	PE	EP	KR	PK	SP	AH
Mean	4.454815	64.85747	60.16216	50.53959	56.00776	53.34115
Median	5.383165	67.14286	63.24736	46.66667	57.91939	52.14286
Max.	14.51975	100	100	100	100	100
Min.	-17.91294	8.056872	2.369668	3.333333	6.603774	8.530806
Std. Dev.	3.989994	24.60163	24.5149	25.31891	28.47772	25.00702
Skewness	-2.05099	-0.440048	-0.121253	0.497506	0.176674	0.254303
Kurtosis	10.73874	2.453741	2.376452	2.487143	1.914291	2.204204
Jarque-Bera	415.536	5.811908	2.424614	6.787469	7.061265	4.831513
Probability	0	0.054697	0.29751	0.033583	0.029286	0.0893
Sum	579.126	8431.471	7821.08	6570.147	7281.008	6934.35
Sum Sq. Dev	2053.687	78075.96	77526.49	82695.11	104616.5	80670.28
Observations	130	130	130	130	130	130

Sumber: Hasil olah Eviews 9

Pada tabel 2 Uji Chow dilakukan untuk membandingkan model FEM dan model REM. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai-P statistik F dan statistik *chi square* adalah sangat kecil, yaitu 0,0000 dan 0,0000. Oleh karena itu, model FEM lebih tepat digunakan untuk menjelaskan pengamatan H0. Sedangkan pada 3 Analisis Hausman menunjukkan bahwa probabilitas efek acak penampang adalah sekitar 0,2845. Oleh karena itu, pendekatan dengan REM lebih mungkin untuk memprediksi hipotesis H0 dengan benar.

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.963373	-9,115	0.0033
Cross-section Chi-square	27.1142	9	0.0013

Sumber: Eviews9, data diolah 2023

Tabel 3 Analisis Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.229567	5	0.2845

Sumber: Eviews9, data diolah 2023

Pada tabel 4 hasil pengujian regresi data panel dengan pendekatan REM menjelaskan bahwa variabel independen, kualitas regulasi, pengendalian korupsi, aturan hukum, efektivitas pemerintah, dan stabilitas politik berpengaruh terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditentukan oleh nilai *prob* (f-statistik) yang sangat kecil, yaitu 0,000000. Sedangkan pada Uji statistik T dengan probabilitas masing-masing variabel independen menunjukkan nilai probabilitas Efektivitas Pemerintah (EP), dan Kualitas Regulasi (KR), masing-masing menunjukkan nilai sebesar $0,0338 < 0,05$, dan $0,0365 < 0,05$ atau 5%, dengan demikian hasilnya menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di negara – negara ASEAN. Sedangkan pada probabilitas Aturan



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

doi 10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Hukum (AH) sebesar $0,0136 < 0.05$ atau 5%, bahwa variabel tersebut memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Adapun hasil lain pada probabilitas stabilitas politik (AH), dan pengendalian korupsi (PK) sebesar $0,3204 > 0.05$, dan $0,2328 > 0,05$ atau 5%, bahwa faktor ini memiliki sedikit atau tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN.

Tabel 4 Analisis Regresi Panel Pendekatan REM

Dependent Variable: PE
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/08/23 Time: 16:56
 Sample: 2010 2022
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 130
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.737070	1.927195	4.533569	0.0000
EP	-0.090007	0.065883	-1.366173	0.1744
KR	-0.088136	0.059477	-1.481839	0.1409
AH	0.170504	0.080226	2.125284	0.0355
SP	-0.023655	0.026696	-0.886069	0.3773
PK	-0.018049	0.059015	-0.305833	0.7602
Cross-section random			1.831381	0.2031
Idiosyncratic random			3.627752	0.7969
Weighted Statistics				
R-squared	0.065846	Mean dependent var	2.145055	
Adjusted R-squared	0.028179	S.D. dependent var	3.698171	
S.E. of regression	3.645693	Sum squared resid	1648.094	
F-statistic	1.748098	Durbin-Watson stat	1.708653	
Prob(F-statistic)	0.128541			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.055630	Mean dependent var	4.454815	
Sum squared resid	1939.440	Durbin-Watson stat	1.451976	

Sumber: Eviews9, diolah 2023

Pembahasan

Efektivitas pemerintah adalah kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Salah satu teori dari James Q. Wilson (2019) mengatakan bahwa ada 2 (dua) perspektif pertama Efisiensi yakni kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan

 [Article History](#)

Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

 [10.14421/skiej.2023.2.2.2114](https://doi.org/10.14421/skiej.2023.2.2.2114)



This is an open access article under the [CC-BY-SA license](#)

sumber daya yang minimum. Kedua efektif, yaitu kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN tahun 2010-2022. Hal ini ditunjukkan oleh probabilitas $0,0338 < 0,05$ atau 5% dan koefisien determinasi $-0,18114$ (menolak H_0 dan menerima H_1) Artinya, setiap penurunan satu poin efektivitas pemerintah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,18114%.

Kualitas regulasi adalah suatu ukuran yang mencerminkan seberapa baik regulasi berfungsi untuk mencapai tujuannya. Terdapat 2 teori *regulatory quality* yang dikembangkan oleh World Bank yang menjelaskan kualitas regulasi. Pertama efektif, yaitu regulasi yang dapat mencapai tujuannya dan kedua efisien, yaitu regulasi yang tidak menimbulkan biaya yang tidak perlu bagi masyarakat.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Kualitas Regulasi adalah variabel independen (KR) memiliki nilai probabilitas 0.0365, artinya nilainya kurang dari *alpha* 0.05 atau *alpha* 5%, dan koefisien determinasi -0.1608 (Menolak H_0 dan menerima H_1). Dari 2010 – 2022, faktor ini akan berdampak negatif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Oleh karenanya, jika Kualitas Regulasi di bawah 1 standar, tingkat pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah -0.1608 persen.

Aturan hukum adalah norma atau ketentuan yang mengikat dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Teori Bayar (2016) yang mengemukakan bahwa Aturan Hukum memiliki pengaruh bagus terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Aturan hukum yakni variabel independen (AH) yang diturunkan dari hasil analisis regresi yang menunjukkan distribusi probabilitas $0.0136 < 0,05$ serta koefisien determinasi koefisien yaitu sekitar 0.246375 (dapat menerima H_1 dan menolak H_0). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari tahun 2010 hingga 2022, aturan hukum dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN.

Stabilitas politik adalah kondisi di mana tidak ada konflik atau kekerasan yang mengancam kelangsungan pemerintahan. Stabilitas politik yang baik dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Iklim politik yang stabil di dalam negeri akan mendorong akumulasi modal fisik dan manusia, yang akan mempercepat proses pertumbuhan (Younis et al. 2016). Studi sebelumnya oleh Awan et al. (2018) dan Bah dan Kpognon (2020) yang menemukan bahwasanya stabilitas politik sebuah negara akan mendorong pertumbuhan ekonominya memberikan dukungan untuk penelitian ini.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Stabilitas Politik yaitu variabel independen yang ke – 4 (SP) mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,3204 > 0.05$ atau hasil tersebut lebih besar dari *alpha* 5%. Serta Koefisiennya sebesar $- 0,05093$ (hasil probabilitas menolak H_1 dan menerima H_0) artinya variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi di negara – negara ASEAN tahun 2010 – 2022.



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang publik untuk keuntungan pribadi. Ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa pengendalian korupsi tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya ialah Teori *selective enforcement*, yang berpendapat bahwa korupsi yang bersifat tidak sistemik, seperti korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris penelitian yang dilakukan oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2009) menemukan bahwa negara-negara dengan pengendalian korupsi yang lebih baik memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ozpolat (2016) dan Awan et al., (2018).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengendalian Korupsi merupakan variabel independen (PK) yang nilainya merupakan *return on investment* setelah dilakukan analisis regresi dengan ukuran sampel $0.2328 > 0.05$ atau *alpha* 5%. dan determinasi koefisien yaitu sekitar 0.096228 (hasil ini menunjukkan menolak H1 dan menerima H0) artinya, variabel pengendalian korupsi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras dengan teori dan penelitian terdahulu yang dijelaskan. Akibatnya, jika Pengendalian Korupsi kurang dari satu standar deviasi, laba atas investasi akan menjadi sekitar 0.096228%. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwasanya, di negara-negara ASEAN antara tahun 2010–2022, faktor pengendalian korupsi memiliki dampak yang dapat diabaikan dan merugikan terhadap pembangunan ekonomi.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model pertumbuhan ekonomi, variabel Efektivitas pemerintah, kualitas regulasi dan aturan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara – negara ASEAN. Oleh karena itu peningkatan pada ketiga variabel tata kelola ini sangat ditekankan. Selain itu, stabilitas politik dan pengendalian korupsi menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan, yang mana untuk mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang otoriter bisa menjadi solusi bagi masalah tersebut, selama dalam konteks untuk menyejahterakan masyarakat dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya pemerintah dalam menjaga praktik korupsi, meskipun hasil menunjukkan arah yang negatif akan tetapi korupsi dapat berakibat fatal bagi kegiatan ekonomi karena tidak hanya membuat prosedur birokrasi menjadi lamban, mahal, dan tidak efisien tetapi juga mengalihkan sumber daya ke kegiatan yang tidak produktif.

Referensi

Bayar, Yilmaz. (2016). Public Governance and Economic Growth in the Transitional Economies of the European Union. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, (48),5–18.



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC–BY-SA license

- Chaudhry, Imran Sharif, Shahnawaz Malik, Khurram Nawaz Khan, and Sohail Rasool. (2009). Factors Affecting Good Governance in Pakistan: An Empirical Analysis. *European Journal of Scientific Research*, 35(3),337–346.
- Crystallography, X-ray Diffraction. (2016). “済無No Title No Title No Title.” 1–23.
- Governance, Pengaruh Good. (2009). “Pengaruh Good Governance Terhadap” 1–28.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. 2011. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. *Hague Journal on the Rule of Law* 3(2),220–246.
- Ma, Liran, Jianbin Luo, 桑原信弘, Takuya Hiramoto, Yasushi Onumata, Yoshitaka Manabe, Hiromitsu Takaba, Energy Corporation, Adsorption Energy, P. J. Flory, Ì. Æ, Takahiro Sato, Riemannian Geometry, Geometric Analysis, M. Muraki, K. Nakamura, Riemannian Geometry, and Geometric Analysis. 2019. No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224(11), 122–130.
- Moktan, Kathleen, and Sandra Nicoll. (2008). Governance and Sustainable Development: The Asian Development Bank Perspective. (3).
- Pradhan, Rudra Prakash, Manish Kumar, and G. S. Sanyal. (2011). Health Infrastructure in India: The Input and Output Association with Economic Growth. *Journal of Health Management* 13(1):59–75.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2006. Economic Development-Todaro.
- Ullan Awan, Rehmat, Tahseen Akhtar, Shazia Rahim, Sher And, and Ahmed Raza Cheema. (2018). Governance, Corruption and Economic Growth: A Panel Data Analysis of Selected Saarc Countries. *Pakistan Economic and Social Review*, 56(1):1–20.
- Weng, Lingfei, Agni Klintuni Boedhihartono, Paul H. G. M. Dirks, John Dixon, Muhammad Irfansyah Lubis, and Jeffrey A. Sayer. (2013). Mineral Industries, Growth Corridors and Agricultural Development in Africa. *Global Food Security*, 2(3):195–202.
- Wibowo, Muhammad Ghafur. 2020. “81_20200729_Ringkasan Disertasi Muh. Ghafur Wibowo - 2020.”
- World Bank. 2006. World Development Report: Equity and Development.
- Younis, Shahzada Aqeel, Shujahat Haider Hashmi, Gulfam Khan Khalid, and Muhammad Imran Nazir. (2016). Impact of Corporate Governance Measures on Earnings Quality: Evidence from Pakistan. *Research Journal of Finance and Accounting* 7(3), 9–16.



Received: August, 2023

Accepted: December, 2023

10.14421/skiej.2023.2.2.2114



This is an open access article under the CC-BY-SA license